



# Buletin Parlementaria

Nomor 1146/III/IV/2021 • April 2021



## Pembangunan Infrastruktur Surakarta Harus Mampu Pulihkan Ekonomi



**3** Bandara Taufiq Kiemas  
Diharapkan Tingkatkan  
Kesejahteraan  
Masyarakat



**4** Azis Syamsuddin  
Dukung  
Pembentukan  
Satgas BLBI



9 772614 339005



BULETIN

# Pembangunan Infrastruktur Surakarta Harus Mampu Pulihkan Ekonomi

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI menekankan bahwa sejumlah infrastruktur yang dibangun di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal di seluruh daerah. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi mengatakan, kondisi ekonomi nasional saat ini sangat terdampak akibat pandemi Covid-19, sehingga harus dilakukan *refocusing* atau penghematan dalam tahun anggaran 2021, serta rincian program kerja setelah penghematan tersebut.

“Kita telah meninjau ke sejumlah titik rencana pembangunan yang akan dibiayai APBN di antaranya jembatan layang (flyover) Purwosari, pengembangan Plaza Ngarsopuro, revitalisasi Taman Budaya Balekambang sebagai pusat kebudayaan Kota Surakarta, rehabilitasi Kawasan Bendung Tirtonadi dan bantuan perumahan di Kelurahan Semanggi. Saya kira dari *masterplan* dan kesiapan lainnya sudah cukup, hanya perlu pengawasan dari seluruh pihak agar berjalan dengan baik. Intinya pembangunan ini bisa untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Surakarta,” kata Arwani saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI meninjau sejumlah rencana pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta, Jateng, Sabtu (10/4).

Selain itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut menilai rencana revitalisasi Taman Budaya Balekambang sebagai pusat kebudayaan Kota Surakarta



Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Foto: Jaka/NV

sangat penting untuk melestarikan budaya, pengembangan pariwisata dan juga sebagai tempat bermain untuk masyarakat. “Untuk rehabilitasi Kawasan Bendung Tirtonadi, kita harapkan selain sebagai fungsi untuk air baku dan pengendalian banjir, tapi kita harapkan juga dipercantik sebagai fungsi wisata. Kemudian juga untuk penataan Kawasan Ngarsopuro juga harus ditegaskan Surakarta sebagai kota budaya dan harus lebih tertata,” imbuhnya.

Arwani menambahkan, tindak lanjut rehabilitasi Kawasan Bendung Tirtonadi harus ada regulasi semacam peraturan daerah tentang sampah. “Saya kira ini penting untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana bersama, jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi masyarakat punya andil juga untuk menjaga. Apa yang kita lihat dan tinjau pada hari ini akan menjadi bahan

dalam kerja dengan para menteri untuk usulan dari Kota Surakarta. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan daerah ini melaksanakan programnya dengan baik,” harap legislator dapil Jateng III ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pihaknya ingin secepatnya mengakselerasi pemulihan ekonomi di Kota Solo. Karena kota-kota lain sudah mulai mempersiapkannya, jangan sampai kota ini tertinggal. “Saya ada beberapa ide seperti Taman Budaya Balekambang bisa menjadi pusat kebudayaan Jawa. Harapannya Solo jadi sebuah kota yang dijadikan *benchmark* kebudayaan Jawa. Mohon saya juga bisa dibantu untuk mengambil alih tanah provinsi agar Balekambang bisa terintegrasi dengan Stadion Manahan Solo sebagai kawasan olahraga,” harap Gibran kepada Komisi V DPR RI. ■jk/sf

# Bandara Taufiq Kiemas Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meresmikan perubahan nama Bandar Udara Pekonserai menjadi Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Foto: Eno/Man

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani terharu dan bangga saat meresmikan perubahan nama Bandar Udara Pekonserai menjadi Bandar Udara Muhammad Taufiq Kiemas. Puan berharap operasional bandara itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai anak dari almarhum Pak Taufiq Kiemas, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengusulkan dan mendukung sehingga nama orang tua kami disematkan menjadi nama bandara ini,” kata Puan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Sabtu (10/4).

Puan lalu mengungkapkan pepatah, bahwa ketika manusia dipanggil oleh Allah SWT Yang Maha Kuasa, maka dia akan meninggalkan “nama”-nya di bumi. “Alhamdulillah nama Pak Taufiq Kiemas yang beliau tinggalkan adalah nama yang harum, nama yang dihormati, nama yang membanggakan bagi kami keluarganya

maupun bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Puan menuturkan, Taufiq Kiemas adalah mantan Ketua MPR RI dan dikenal sebagai negarawan yang gigih menjaga konstitusi Indonesia dan bisa menyatukan semua elemen bangsa. Dia melanjutkan, Taufiq Kiemas juga terus mengedepankan kerukunan bangsa dan selalu mengingatkan pentingnya menjaga dan menerapkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika.

“Saya berharap bandara ini sekarang menyandang nama almarhum Pak Taufiq Kiemas, maka bandara ini turut berperan dalam menjaga semangat kebangsaan dari Almarhum,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu. Semangat kebangsaan lain dari Pak Taufiq Kiemas, kata Puan, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dia harap dapat terwujud melalui bandara yang baru diresmikan pergantian namanya itu. ■ eno/sf



#### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

#### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

#### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

#### PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

#### W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

#### REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

#### REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

#### SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual, Ramadhina, A.Md.Ds

#### ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ertangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budimar, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Deslianti, S.I.P, Kom, Rahayu Setyawati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alayudus

#### FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naeufroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

#### ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

#### INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

#### ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

#### PENERBITAN

##### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

##### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

##### STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

##### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

##### PHOTOGRAFER ART

Frederick Munchen

##### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

##### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

##### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

##### ADMINISTRASI

##### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

##### ISI BERITA DAN MATERI FOTO

##### DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Azis Syamsuddin Dukung Pembentukan Satgas BLBI

**W**akil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Saya mendukung kebijakan Presiden bahwa (Satgas) ini untuk menagih perjanjian yang sudah ditandatangani untuk penyerahan dana dan aset yang masih belum terselesaikan. Jika terjadi transaksional dalam Satgas ini, maka kami persilakan masyarakat atau elemen lain dapat melaporkan ke lembaga DPR dan bisa melalui Komisi III atau Pimpinan DPR,” kata Azis dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Selasa (13/4).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menilai langkah Presiden menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen

untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sudah cukup lama tak kunjung selesai, diharapkan satgas dapat menjalankan tugas dengan optimal untuk mengembalikan dana BLBI dari para obligor.

“Pemerintah menjelaskan struktur dan mekanisme kerja dari Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, sehingga tujuan dan target pembentukan Satgas dapat dicapai

secara maksimal,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Azis meminta Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk bersinergi dengan seluruh *stakeholder* agar dana dan aset negara dapat segera dikembalikan, serta para pelaku yang terlibat kasus BLBI dapat ditindak hukum. Pemerintah untuk melakukan pengawasan kuat dan evaluasi berkala terhadap kinerja dari Satgas tersebut, sehingga penyelesaian kasus BLBI dapat diselesaikan sesuai target waktu yang sudah ditentukan.

“Satgas dan pemerintah untuk melakukan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyelesaian kasus ini, sehingga publik juga dapat memantau dan mengawasi proses penyelesaian kasus BLBI, pemerintah untuk berkomitmen menyelesaikan kasus BLBI tersebut dengan tuntas, tidak hanya sekadar retorika,” tutupnya.

■ sf

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.  
Foto: Mario/Man



# Gus AMI Berharap Muktamar Pemikiran Dosen PMII Lahirkan Solusi Kebangsaan



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto:lst/Man



**SAYA BERSYUKUR BISA HADIR DI SINI, MENGAPA? KARENA DI TENGAH PANDEMI, ANCAMAN RESESI DI BELAHAN DUNIA MENYERUAK SEBUAH ACARA MUKTAMAR PEMIKIRAN DOSEN PMII INI**

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendukung penuh Muktamar Pemikiran Dosen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pun berharap dalam muktamar tersebut muncul gagasan dan solusi konkret bagi Indonesia dalam menyelesaikan problem sosial, ekonomi, keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan.

Hal tersebut disampaikan Gus AMI, sapaan akrabnya, ketika menghadiri sekaligus membuka secara resmi Muktamar Pemikiran Dosen PMII yang digelar di UIN Tulungagung, Jawa Timur, Senin (5/4). Muktamar tersebut dinilai Gus AMI sangat tepat digelar saat ini, karena Bangsa Indonesia, bahkan dunia, sedang gelisah sekaligus berjuang mencari solusi yang tepat dan efektif.

“Lalu lahirlah gagasan untuk bersama-sama berpikir menggunakan berbagai kajian, teori dan seluruh ilmu-ilmu yang ada di kampus maupun di luar kampus, wabil khusus para

dosen PMII untuk menggagas (dan) mencari solusi problematika itu,” jelas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Gus AMI mengaku bangga bisa menghadiri Muktamar Pemikiran Dosen PMII lantaran serasa bernostalgia dengan organisasi yang ia geluti semasa kuliah di Yogyakarta dulu. Terlebih acara besar itu digelar di saat Indonesia berjuang mencari solusi terbaik terbebas dari pandemi Covid-19.

“Saya bersyukur bisa hadir di sini, mengapa? Karena di tengah pandemi, ancaman resesi di belahan dunia menyeruak sebuah acara Muktamar Pemikiran Dosen PMII ini. Di sisi yang lain, selama ini berjuang melalui jalur politik tentu saja, modal saya modal dengkul, bukan modal otak. Makanya saya menggantungkan kepada senior-senior, pemikir-pemikir jalan keluar apa yang terbaik bagi Indonesia di masa yang akan datang,” ungkap Gus AMI.

Melalui Muktamar ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut

menaruh harapan besar muncul jalan keluar, minimal *roadmap* untuk menyelesaikan berbagai problem tersebut. “Mereka pemikir, para ahli, Guru Besar akan menggunakan ilmu-ilmunya. Apalagi kalau bicara soal Indonesia pasti soal keislaman,” ujarnya.

Untuk itu, mantan Ketua Umum Pengurus Besar PMII itu secara khusus menyampaikan selamat sekaligus bangga kepada pengurus Ikatan Alumni (IKA) PMII yang sudah menggagas Muktamar Pemikiran Dosen PMII tersebut. “Juga kepada para Guru Besar, para Dosen, para Dekan yang hadir dan mengikuti acara ini. Selamat bermuktamar,” tutup Gus AMI.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj secara virtual, Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar, Ketua Umum PB IKA PMII Ahmad Muqowam, Anggota DPR RI M. Hasanuddin Wahid, Cucun A. Syamsurijal, Anggia Ermarini serta sejumlah Anggota DPRD F-PKB Provinsi/ Kabupaten/Kota. ■ **er/sf**

# Komisi I Soroti Areal Latihan dan Alutsista Yonkav 4 Kijang Cakti



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI ke Yonkav 4/Kijang Cakti, di Bandung, Jabar. Foto: Runi/Man

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI menyoroti persoalan areal lahan latihan dan alat utama sistem senjata (alutsista) di Batalyon Kavaleri 4/Kijang Cakti (Yonkav 4/KC). Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid mengatakan, pihaknya mendapati informasi saat ini Yonkav 4/ Kijang Cakti tidak memiliki areal latihan yang luas untuk latihan menggunakan kendaraan berat. Usia alutsista yang tua juga dinilai sudah tidak relevan.

Hal tersebut mengemuka saat Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Yonkav 4/Kijang Cakti, di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (12/4). Tim Kunker Komisi I DPR RI diterima Kepala Staf Komando Daerah Militer III/Siliwangi Brigjen Kunto Arief Wibowo, Komandan Batalyon Kavaleri 4/Kijang Cakti Letnan Kolonel Kavaleri Cristian Gordon Rambu serta pejabat Kodam III Siliwangi, dan pejabat Yonkav 4/Kijang Cakti.

Lokasi latihan yang terlalu jauh juga mendapat perhatian Komisi I DPR RI. “Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi negara. Saya rasa ini perlu kerja sama dan sinergitas kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan izin areal dan lahan untuk latihan. Sebagaimana yang dibutuhkan teman-teman Yonkav 4/KC dalam mengatasi masalah yang krusial yang saat ini,” kata Meutya.

Saat ini Yonkav 4/KC sedang berusaha untuk mendapatkan izin di areal latihan Ciwidey. Diharapkan nantinya Yonkav 4/KC bisa menjalankan latihan sesuai prosedur. Meutya menambahkan, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap beberapa alutsista milik Yonkav 4/KC yang dinilai sudah cukup tua. Salah satunya kendaraan yang sudah dipakai sejak tahun 1958. Politisi Partai Golkar itu menilai alutsista tua tersebut perlu peremajaan.

“Kami rasa ini perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni Kementerian Keuangan selaku pemegang anggaran, harus

memberikan perhatian lebih kepada peningkatan kekuatan dari pada peran TNI itu sendiri. Peralnya peran dan keikutsertaan TNI sudah terbukti. Ditugaskan tidak hanya untuk menjaga pertahanan militer saja, namun dalam kondisi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sudah dilakukan sudah sangat baik,” papar Meutya.

Di tempat yang sama, Komandan Batalyon Kavaleri 4/Kijang Cakti Letnan Kolonel Kavaleri Cristian Gordon Rambu menjelaskan bahwa Yonkav 4/Kijang Cakti saat ini sudah tidak lagi memiliki lahan areal latihan yang relevan untuk melaksanakan latihan, pasalnya sudah padat penduduk dan ramai lalu lintas.

“Untuk itu saya mengharapkan bantuan Komisi I agar mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi daerah latihan yang sesuai dengan PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara,” harap Komandan Yonkav 4/KC. ■ rmi/sf

# Komisi I Tinjau Kesiapan Yon Arhanud I Laksanakan OMP dan OMSP



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono memimpin Tim Kunker Komisi I DPR RI meninjau sarpras Batalyon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad. Foto: Cashbi/Man

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komandan Batalyon (Danyon) Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) I Divisi Infanteri I/Purwa Bajra Cakti Letkol Arh Helmy Ariansyah beserta jajarannya.

Bambang menjelaskan, tujuan Kunker Komisi I DPR RI kali ini adalah untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan kesiapan dan peran Batalyon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad dalam melaksanakan tugas pokok Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi

Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah tugasnya.

“Kunjungan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui secara langsung satuan-satuan TNI yang ada di bawah. Secara prinsip, satuan ini masih memerlukan dukungan yang lebih baik lagi. Kita sudah himpun dan akan kita rapatkan bersama dengan Menteri Pertahanan,” kata Bambang di Kota Tangerang, Banten, Senin (12/4).

Hal ini sejalan dengan apa yang sedang menjadi fokus di Komisi I DPR RI saat ini, bahwa saat ini Komisi I DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Alat Utama Sistem Pertahanan (Panja Alutsista), yang salah satu tujuannya

adalah untuk mengkaji rencana induk pengadaan alutsista *Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024*.

“Kami (Komisi I DPR RI, **red**) berharap, hasil kunjungan kerja ini dapat menambah temuan yang akan menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Dalam kunjungan tersebut, tim kunker reses Komisi I DPR RI juga meninjau pangkalan asrama Yonarhud 1/K, kompleks barak, garasi alutsista, lapangan tembak pistol, lapangan tembak senapan dan juga menyaksikan demonstrasi *drill* alutsista di lapangan sepak bola Yonarhud. ■ cas/sf

# Komisi I Kunjungi Lanud Atang Sendjaja

**T**im Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melakukan kunjungan ke Lanud Atang Sendjaja (ATS) di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kharis mengatakan, melalui kunjungan ini Komisi I DPR RI ingin menyerap aspirasi mengenai permasalahan yang dihadapi jajaran Lanud ATS.

“Jadi, Komisi I DPR RI telah melakukan pertemuan di Kantor Lanud Atang Sendjaja yang diterima langsung oleh Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Fakhrizet beserta jajarannya. Selama agenda tanya jawab, kami sudah mendengarkan berbagai penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Lanud Atang Sendjaja,” ungkap Kharis usai pertemuan dengan Komandan Lanud



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari bertukar cenderamata dengan Komandan Lanud Atang Sendjaja (ATS) Marsma TNI Fakhrizet. Foto: Hanum/Man



**TIM KUNKER KOMISI I DPR RI AKAN MENJADIKAN BERBAGAI MASUKAN YANG TELAH DIDAPAT DARI PERTEMUAN DENGAN KOMANDAN LANUD ATS BESERTA JAJARANNYA UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN MELALUI FUNGSI LEGISLASI, FUNGSI ANGGARAN, DAN FUNGSI PENGAWASAN**

ATS beserta jajarannya di Pangkalan Udara Atang Sendjaja, Bogor, Jabar, Senin (12/4).

Karenanya, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan bahwa Tim Kunker Komisi I DPR RI akan menjadikan berbagai masukan yang telah didapat dari pertemuan dengan Komandan Lanud ATS beserta jajarannya ini untuk dijadikan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

“Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Lanud Atang Sendjaja atas berbagai upaya yang telah dilakukan. Salah satunya, terkait

peran Lanud Atang Sendjaja dalam pelaksanaan Tugas Pokok Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Wilayah Tugas,” kata politisi Jawa Tengah V itu.

Untuk diketahui, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Atang Sendjaja merupakan salah satu pangkalan udara yang berada di dalam jajaran pembinaan Komando Operasi TNI AU I (Koopsau I) Jakarta. Lanud ATS juga memiliki tugas untuk menyiapkan dan melaksanakan pembinaan serta pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya, pemberdayaan wilayah pertahanan udara dan menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya. ■ hnm/sf



# Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak di NTB



Foto bersama Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan mitra kerja di Kantor Gubernur NTB. Foto: Alfi/Man

**K**omisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tim kunker menjangkau aspirasi terkait evaluasi pelaksanaan oleh Pilkada Serentak 2020. Disampaikan Doli, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di NTB merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya.

“Penyelenggaraan Pilkada 2020 di NTB ini cukup berhasil. Tadi disampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilihnya paling tinggi dibandingkan daerah lain. Rata-rata seluruh NTB di 7 kabupaten/kota mencapai sekitar 82 persen, bahkan di Kabupaten Dompu mencapai 93 persen. Ini prestasi luar biasa, artinya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu daerah setempat sudah berhasil,” kata Doli saat diwawancara usai pertemuan yang berlangsung di

Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (12/4)

Meski berjalan mulus, Doli menyampaikan sejumlah catatan evaluasi Pilkada serentak 2020. Salah satunya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisi II sendiri sebenarnya telah berkesimpulan bahwa DPT sudah diwanti-wanti akan menjadi permasalahan di setiap penyelenggaraan pemilu.

“Masalah di hulunya adalah soal data kependudukan kita, makanya kita berkali-kali sudah sampaikan kepada Mendagri supaya persiapan 2024 nanti mumpung masih 2 tahun lagi, kita harus bisa mengejar, mempersiapkan, hingga menyelesaikan semua persoalan tentang DPT. Sehingga terbentuk sistem *database* yang valid, terintegrasi, dan tidak terjadi permasalahan lainnya,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Terkait evaluasi Pilkada serentak 2020, Komisi II sebenarnya telah

telah membuat panitia kerja (panja) Pilkada 2020. Doli menjelaskan, kerja panja sudah selesai mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu. Hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Kerja yang telah dibentuk terdiri dari Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang nantinya akan merancang desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Itu (Pemilu 2024, **red**) akan jadi sejarah baru. Dimana, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dalam satu tahun penuh, mulai dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada pada Maret dan November 2024. Tentu, hal itu jadi pekerjaan yang maha berat, makanya harus kita cicil persiapannya supaya nanti tidak menumpuk. Jadi, Tim Kerja akan mulai bekerja minggu ini selama masa reses, sehingga saat masa sidang sudah bisa dibahas melalui rapat kerja dan bisa diputuskan konsep, tahapan dan waktu yang *fix*,” papar Doli. ■ **alw/es**

# Komisi II Pertanyakan Pembatalan Sertifikat APL Masyarakat Riau oleh Menteri LHK



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau. Foto: Ayu/Man

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah dikuasai masyarakat Riau dan sudah mendapat sertifikat, namun bisa dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui SK 903/MENLHK.

“Cukup menggelitik penjelasan dari Kakanwil BPN Provinsi Riau ini. Di mana ada APL yang sudah dikuasai masyarakat dan sudah tersertifikasi atau mendapat sertifikat, tapi bisa dibatalkan oleh Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan melalui SK 903/MENLHK,” ungkap Junimart saat memimpin tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah ATR/BPN Riau di Pekanbaru, Minggu (11/4).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan, saat ini masyarakat Riau merasa haknya terenggut dan dirugikan dan mereka menuntut Pemerintah Provinsi Riau. “Ini tentu harus kita cermati dan kritisi di Komisi II DPR RI,” imbuh Junimart.

Junimart menyampaikan, dari penjelasan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Riau, kawasan hutan lindung di Riau

ini menjadi lebih dari 5 juta hektar. Ia merasa, masih ada informasi yang belum terbuka terkait jumlah APL di provinsi Riau yang dibatalkan dengan SK 903/MENLHK, sehingga sekarang menjadi lebih dari 5 juta hektar.

“Ini akan kami dalam dalam pertemuan berikutnya dengan pemerintah Provinsi Riau. Bahkan kami juga akan mendiskusikan hal ini dengan Menteri ATR/BPN dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, apakah bisa APL yang sudah mendapat sertifikat, bisa dibatalkan semena-mena oleh Menteri LHK lewat SK 903 tadi,” pungkas Junimart. ■ ayu/es

# Rifqinizamy Dorong Pemerintah Terapkan Standardisasi Nasional Seleksi PPPK

**A**nggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk segera menerapkan standardisasi nasional dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tujuannya, demi menghindari potensi *conflict of interest* dan menjaga netralitas.

Demikian dipaparkan Rifqi, usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Kalteng dan jajaran di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin (12/4). Adapun, pembahasan tentang evaluasi persiapan proses penerimaan PPPK dan evaluasi Pilkada 2020.

"Komisi II DPR RI melihat belum adanya standardisasi tingkat nasional dalam seleksi PPPK oleh masing-masing daerah. Mengingat, prosedurnya masing-masing daerah melakukan seleksi lalu kemudian hasil seleksi ditetapkan oleh SK Gubernur yang menjadi dasar penetapan. Sehingga, kemudian berpotensi muncul *conflict of interest* dan menjaga netralitas dalam seleksi," ujar Rifqinizamy.

Di sisi lain, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti banyaknya daerah yang mengeluhkan ketidakmampuan untuk memberikan honorarium kepada PPPK. Terkait hal itu, Rifqinizamy mengingatkan



Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Puntho/NVI

pemerintah khususnya BKN dan Kemenpan-RB agar segera mencari solusi atas permasalahan tersebut.

"Jadi, ada dua item honorarium. Pertama, honorarium daerah dan pusat. Sebagaimana diketahui, gaji ASN di-*support* melalui skema DAU yakni dari APBN ke APBD. Khusus PPPK, sebagian besar harus dialokasikan oleh masing-masing APBD sehingga kemudian daerah merasa belum siap. Maka, Kemenpan-RB dan BKN harus mencari jalan tengah dan berkonsultasi dengan Kemenkeu," tandasnya.

Selain itu, berkaitan dengan evaluasi Pilkada 2020, Rifqi mengusulkan, ke depannya pemerintah wajib memprioritaskan

digitalisasi pemilu demi terwujudnya pemilu yang lebih akuntabel dan transparan. Mengingat, sistem informasi rekap (Sirekap) yang dimiliki KPU kalah cepat dibandingkan rekap manual di Pilkada 2020.

"Ketika rekap manual sudah 100 persen sementara Sirekap belum mencapai persentase yang sama, maka rekap manual dijadikan dasar untuk memenuhi Sirekap. Hal ini persoalan administratif yang berimplikasi pada persoalan substansial. Karena itu, saya meminta KPU dan Bawaslu untuk memetakan betul persoalan terkait dengan digitalisasi Pemilu agar jangan terulang di 2024," pungkas legislator dapil Kalimantan Selatan I itu. ■ pun/es

# Kerja Sama yang Terintegrasi Kunci Penyelesaian Persoalan di Lapas



**KITA BERUPAYA UNTUK MERANGKUL MITRA-MITRA KERJA, KHUSUSNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MencariKAN SUATU SOLUSI**



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bertukar cenderamata dengan Kapolda Bali. Foto: Nadia/Man

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, permasalahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) terkait *over capacity*, minimnya sumber daya manusia penjagaan, hingga peredaran narkoba di dalam lapas, tidak serta merta diserahkan seutuhnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja. Melainkan, perlu kerja sama yang terintegrasi antara aparat penegak hukum. Kerja sama ini akan menjadi kunci utama penyelesaian masalah.

Hal tersebut disampaikan Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan

Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham Bali, yang juga dihadiri jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara Bali, di Denpasar, Bali, Sabtu (10/4).

“Kita berupaya untuk merangkul mitra-mitra kerja, khususnya dalam penegakan hukum untuk mencariKAN suatu solusi. Kalau tidak dicarikan satu solusi, hal ini tidak akan berakhir, Terus dan terus terjadi baik itu pergantian kakanwil, pergantian menteri, dan pergantian dirjenpas dan lain-lainnya selalu terjadi, dan akan terjadi lagi. Jadi memang harus dicarikan solusi,

bagaimana mengatasi kapasitas yang *over crowded* di lapas khususnya narapidana narkoba ini,” kata Adies.

Dirinya menyadari, Kantor Wilayah Kemenkumham sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk mengatasi seluruh persoalan yang dihadapi. Namun langkah yang diambil tidak dapat dilakukan jika tidak ada kebijakan dari pusat yang dapat mengurangi kendala tersebut. Sebagai contoh, memindahkan narapidana dari satu lapas yang padat ke lapas yang lain, kemudian juga pemisahan hukuman bagi pengedar dan pemakai narkoba. Dimana, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham saja.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyoroti peredaran narkoba di lapas yang cukup tinggi. Sesuai dengan paparan yang disampaikan Kanwil Kemenkumham Bali, bahwa penghuni lapas yang ada di Bali, baik itu Lapas Grobogan dan Lapas Bangli mayoritas diisi oleh tahanan narkoba. Tentunya, hal ini menjadi sangat memprihatinkan baginya.

“Kita mendorong agar Kemenkumham betul-betul melakukan tindakan yang konkret bagaimana mungkin narkoba itu bisa masuk di lapas. Lalu kemudian juga tentang mereka yang masih bisa melakukan transaksi peredaran narkoba. Kita juga meminta aparat kepolisian daerah di Bali ini agar melakukan suatu tindakan tegas seperti sidak terhadap penghuni maupun petugas lapas yang ada di Bali ini,” tegas Sudding. ■ ndy/es

# Komisi III Soroti Kelebihan Kapasitas Lapas di Aceh

**A**nggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyoroti kasus kelebihan kapasitas lapas di Provinsi Aceh. Ia mendapati informasi, kelebihan kapasitas rutan di Aceh sejauh ini cukup tinggi, hampir 500 persen. Bahkan hal ini tidak hanya terjadi di Aceh, melainkan hampir di seluruh provinsi. Menurutnya, kondisi ini tentunya semakin rentan terjadinya konflik antar penghuni lapas tersebut akibat kelebihan kapasitas.

“Hal ini kemudian menjadi catatan kami (Komisi III DPR RI) dan kami mempertanyakan bagaimana program

asimilasi yang sudah dilakukan pada tahun lalu bisa signifikan,” pungkas Eva saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke Mapolda Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (10/4).

Dari hasil paparan Kakanwil Kemenkumham Aceh, Eva menyimpulkan bahwa mayoritas napi dan tahanan tersebut tersandung kasus narkoba, selebihnya kasus korupsi, hingga tindak pidana umumnya lainnya. Meskipun saat ini Aceh sudah memiliki lapas khusus narkotika di Kota Langsa, namun kapasitasnya belum juga mencukupi.

“Jadi total semuanya lebih dari 50 persen berkaitan dengan kasus narkoba. Jadi di Aceh khususnya napi narkoba, meskipun sudah ada Lapas khusus, tapi karena kapasitas terbatas, maka setiap lapas yang ada di Aceh, pasti terdapat napi narkoba di dalamnya,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas tersebut, ia bersama Komisi III DPR RI mendukung adanya rencana pemindahan narapidana ke lapas yang baru. Hal ini dilakukan seiring dengan kapasitas lapas yang terus meningkat, sehingga tidak sesuai dengan daya tampung narapidana di dalamnya.

Anggota Komisi III DPR RI  
Eva Yuliana. Foto: Dipa/Man

”

**JADI DI ACEH KHUSUSNYA NAPI NARKOBA, MESKIPUN SUDAH ADA LAPAS KHUSUS, TAPI KARENA KAPASITAS TERBATAS, MAKA SETIAP LAPAS YANG ADA DI ACEH, PASTI TERDAPAT NAPI NARKOBA DI DALAMNYA**

“Persoalan lain melalui usulan dari Kanwil Kemenkumham Aceh, yakni adanya pulau terluar yang sudah diusulkan untuk dibangun lapas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas, nah usulan seperti ini saya dukung penuh,” pungkas politisi Partai NasDem ini.

Melihat hal ini, Eva menambahkan bahwa pemidahan lapas dengan jarak yang tidak terlalu jauh ini dapat menjadi langkah cepat pemerintah. Tentu hal ini menjadi langkah terbaik, sebagai bagian dalam hal meminimalisir anggaran yang nantinya akan dikeluarkan.

“Saya sangat setuju sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar ketika memindahkan narapidana dari lapas ini ke Nusa Kambangan. Usulan ini nantinya bisa kita bawa, serta bisa menjadi bahan evaluasi dirapat masa sidang mendatang bersama dengan mitra kita yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, kita bisa tahu sejauh mana anggaran pemerintah dapat meng-cover terhadap usulan tersebut,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V itu. ■

dip/sf



# Komisi III Soroti Kasus Video 'TikTok' di Lapas Pariaman

**A**nggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti kasus video viral yang merekam sejumlah narapidana menggunakan aplikasi *TikTok* dengan sebuah gawai (*handphone*) yang diduga terjadi di Lapas Kelas II B Pariaman, Sumatera Barat. Bima, sapaan akrab Bimantoro sangat menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi di dalam lapas, mengingat gawai merupakan barang yang dilarang digunakan dari dalam lapas.

"Saya mendapatkan info Pak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, sekarang ini sedang ada kasus yang sedang viral dan terlihat di media *online* mengenai *handphone* yang beredar di lapas, terutama yang berada di Lapas Kelas II B Pariaman. Di situ ada seorang napi yang viral dengan bermain *TikTok*," kata Bima dalam pertemuan Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar, di *Convention Center* Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Minggu (11/4).

Bima mempertanyakan langkah-langkah pencegahan serta pengawasan yang sudah dilakukan oleh kepala lapas ataupun kepala keamanan lapas, sehingga kejadian itu bisa sampai terjadi. Menurut Bima, apabila masih bisa terjadi kejadian seperti itu, bagaimana dengan pencegahan narkoba yang bisa dikendalikan dari dalam lapas.

"Nah ini bagaimana langkah-langkah pencegahannya, jika masih terjadi seperti ini, bagaimana untuk pencegahan narkoba bila di sana masih bisa bermain sosial media dengan mudahnya, mohon penjelasannya Pak (Kakanwil)," kata politisi Partai Gerindra itu.

Kakanwil Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya membenarkan adanya video viral *TikTok* yang dilakukan oleh para narapidana di Lapas II B Pariaman. Menurut Andika, berdasarkan investigasi yang sudah dilakukan, pihaknya sudah mengantongi pelaku sebanyak empat orang wanita dan video tersebut dibuat pada awal Januari 2021.

"Betul Pak, adanya video viral *TikTok* yang dilakukan oleh narapidana di Lapas II B Pariaman, itu berdasarkan pendalaman dari yang kita sangkakan sebagai pelaku yaitu narapidana wanita sebanyak empat orang itu dibuat di awal Januari tahun 2021," kata Andika.

Andika menjelaskan, kejadian itu sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang berarti juga satu kesalahan yang dilakukan oleh manajemen lapas, yakni kepala lapas, kepala keamanan lapas dan tim yang bertugas saat terjadinya perekaman itu.

Andika melanjutkan, pihaknya sudah mengambil langkah cepat, di mana kepala lapas dan kepala keamanan yang bertanggungjawab atas kejadian itu sudah di nonaktifkan untuk dilakukan pembinaan di Kanwil dan diberikan juga sanksi tegas dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk para napi, sudah diberi sanksi pencabutan hak-hak pembinaan, seperti diantaranya adalah pencabutan remisi.

Kendati demikian, Bima belum merasa puas dengan jawaban dari Andika. Bima menginginkan adanya suatu langkah konkret agar kejadian tersebut tidak terulang lagi ke depannya. "Yang ingin saya perdalam



Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono. Foto: Kiki/Man

Pak, bagaimana upaya dari bapak agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi, karena saya pikir, bilamana hal ini masih bisa terjadi pasti kasus-kasus lain masih memungkinkan terjadi Pak," tegas Bima lebih lanjut.

Andika meyakini petugas-petugas di lapangan, khususnya pada lapas-lapas yang berada di Sumbar, bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. "Namun kami tetap yakin teman-teman di lapangan, para kalapas tidak berani main-main, karena Pak Menteri dan Pak Dirjen itu tegas, banyak pengisian untuk menggantikan dan banyak kader-kader terbaik yang siap mengisi jabatan kapalas," tutup Andika. ■ qq/sf

# Pemanfaatan Padi Inpari Nutri Zinc Guna Atasi 'Stunting'

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono melakukan panen perdana padi jenis Inpari Nutri Zinc di Desa Sendang, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padi kaya akan kandungan *Zinc* ini kabarnya dapat dimanfaatkan dalam mengatasi *stunting*.

“Sege nap Anggota Komisi IV memberikan apresiasi kepada para petani, dengan lahan cetak sawah baru dapat menghasilkan padi sekitar 7,1 ton per hektar, ini sebagai contoh yang baik bagi provinsi lain,” ucap Budi saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI ke Kulon Progo, DIY, Sabtu (10/4).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan kegiatan ini sangat penting, karena Komisi IV DPR RI dapat meninjau langsung dan melihat hasil kerja Bupati Kulon Progo, Kelompok Tani, dan dukungan dari Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan itu pihaknya juga ingin mendengarkan aspirasi langsung dari petani, dinas pertanian dan kelompok tani.

“DPR RI akan mendukung dan mendorong semua kebijakan, khususnya mitra kerja kami, Kementerian Pertanian, yang dapat mewujudkan program-program yang pro terhadap para petani. Kita ingin para petani langsung mendapat manfaat dari program kementerian dan dalam rangka menuju kesejahteraan para

petani,” harap legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan, padi Inpari Nutri Zinc adalah padi dengan kandungan tinggi *Zinc* guna mengatasi masalah *stunting*. Varietas unggul baru (VUB) padi biofortifikasi Inpari IR Nutri Zinc sebagai salah satu sumber pangan dengan kandungan gizi *Zinc* 6 persen lebih tinggi daripada varietas padi lainnya.

Lebih lanjut Suwandi mengatakan, pada 2020 Kementan telah menanam seluas 10.000 ha, rencananya 2021 akan menanam seluas 50.000 hektare di 95 kabupaten dengan daerah rawan pangan guna menanggulangi *stunting*.

■ opi/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI ke Kulon Progo, DIY. Foto: Gerald/Man

# Komisi IV Pastikan Stok Beras Nasional Aman Hingga Juni



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Pergudangan GBB Pacada Bitung Perum Bulog, Sulawesi Utara. Foto: Anne/Man

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin memastikan stok beras Bulog aman hingga bulan Juni mendatang. Hal itu sekaligus menegaskan penolakan Komisi IV DPR RI terhadap kebijakan impor beras sebesar satu juta ton dan meminta Perum Bulog memperhatikan serapan produksi gabah petani.

“Komisi IV menolak tentang rencana atau isu impor 1 juta ton beras. Saat ini digulirkan banyak petani di negeri ini dirugikan, karena begitu isu harga beras jadi turun di seluruh Indonesia,” papar Hasan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Pergudangan GBB Pacada Bitung Perum Bulog, Sulawesi Utara, Sabtu (10/4).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, sebagaimana penjelasan dari Bulog dan Kementerian Pertanian, stok beras Bulog seharusnya cukup untuk memastikan kebutuhan masyarakat biasa terpenuhi. Apalagi, saat ini memasuki masa panen raya.

“Penjelasan dari Bulog dan Kementan, stok beras cukup sampai bulan Juni sehingga terakhir Presiden sudah menyakinkan dari rekomendasi Komisi IV, akhirnya beliau menyampaikan rekomendasi tersebut diterima dan tidak akan melakukan importasi beras sampai dengan bulan Juni,” terangnya.

Hasan juga meminta kepada pemerintah agar memberikan kewenangan yang seimbang antara menyerap gabah petani dan penugasan penyaluran Bulog. Hal itu juga sebagai

”

**KOMISI IV MENOLAK TENTANG RENCANA ATAU ISU IMPOR 1 JUTA TON BERAS. SAAT ISU INI DIGULIRKAN BANYAK PETANI DI NEGERI INI DIRUGIKAN**

solusi atas permasalahan Bulog selama ini yang berkaitan dengan distribusi beras. Diketahui, hasil pengadaan impor tahun 2018-2019 sebelumnya masih menumpuk dan berpotensi mengalami penurunan mutu.

“Libatkan Bulog dalam pemberian bantuan nontunai kepada rakyat. Kedua, setiap bansos yang diberikan kementerian mana pun berasnya beli kepada Bulog. Saya pikir ini adalah solusi untuk menjawab pertanyaan masyarakat,” usul legislator dapil Jawa Timur II itu.

Sebelumnya, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menyampaikan realisasi pengadaan nasional per 8 April 2021 mencapai 322 ribu ton. Sedangkan realisasi tahun lalu 1,26 juta ton atau persentase 89,75 persen dari target 1,4 juta ton. “Jumlah stok nasional per 8 April 1,1 juta ton, realisasi pengadaan 307 ton. Khusus di Sulut, stok kita ada di 7 ribu ton,” katanya.

Stok beras yang tersedia di Gudang Bulog mencapai 1,1 juta ton merupakan stok cadangan beras pemerintah dan stok beras komersial. Ia menilai, stok tersebut cukup untuk kebutuhan penjualan, Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSA) dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Bulog. ■ **ann/sf**



# Komisi IV Pastikan Stok Beras Sumbang Aman saat Hari Raya

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan Kunjungan Kerja Komisi IV ke Sumatera Barat ingin melihat langsung ketersediaan stok beras di gudang Bulog dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2021.

“Kita ingin melihat ketersediaan dari beras aman terutama menjelang Ramadan dan hari raya Idulfitri karena bersamaan dengan hari kenaikan Isa Almasih, jika dilihat sejauh ini aman tetapi kita meminta dipastikan betul karena ternyata lebih banyak yang impor dan bahkan ada yang stok beras 2018,” kata Anggia usai meninjau Gudang Bulog Wilayah Padang, Sumatera Barat, Minggu (11/4).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini berharap, saat panen raya pada bulan Maret-April, ada ketegasan dari Bulog untuk menyerap hasil panen para petani secara maksimal. “Kami meminta Bulog agar

ada serapan maksimal dari beras petani saat memasuki masa panen di bulan Maret dan April. Sementara bulan Juni, kami meminta data ketersediaan beras Bulog untuk mengkaji kebijakan impor beras,” jelas Anggia.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Muslim menilai ketersediaan beras di Bulog untuk tahun ini cukup kondusif dan tidak ada kendala. Ia meminta agar pemerintah tidak melakukan impor ketika petani sedang panen raya.

“Kita berharap kembali menjadi negara yang swasembada pangan seperti dulu. Kita juga pernah swasembada pangan dan kita berharap stok-stok

beras Bulog segera didistribusikan, jangan sampai nanti ditahan di gudang Bulog yang pada akhirnya

begitu diberikan kepada masyarakat ternyata tidak layak untuk dikonsumsi,” tukas Muslim. ■ afr/es

”

**KITA INGIN MELIHAT KETERSEDIAAN DARI BERAS AMAN TERUTAMA MENJELANG RAMADAN DAN HARI RAYA IDULFITRI KARENA BERSAMAAN DENGAN HARI KENAIKAN ISA ALMASIH**



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Foto: Arief/Man

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan jalan tol memiliki peran penting dalam mendukung sistem logistik nasional guna menciptakan efisiensi dan menekan biaya logistik. Menurutnya, penyediaan infrastruktur berupa jalan tol seperti tol Surabaya - Probolinggo - Malang tentu dapat memberi kemudahan akses kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menilai diperlukan upaya dari seluruh pelaksana jalan tol agar dapat memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.

“Supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan antara perusahaan satu dan lainnya, kita berharap bahwa kualitas (jalan tol) itu bisa dijaga, sehingga bisa mereduksi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kualitas yang kurang baik,” tutur Andi Iwan di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (10/4).

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut itu menuturkan, dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan tol, maka persoalan pembebasan lahan harus mendapat perhatian yang lebih serius dari seluruh pemangku

# Standar Kualitas Jalan Tol Harus Jadi Perhatian



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (tengah) di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Sidoarjo, Jawa Timur. Foto: Fitri/Man



**SUPAYA TIDAK TERJADI PERBEDAAN-PERBEDAAN ANTARA PERUSAHAAN SATU DAN LAINNYA, KITA BERHARAP BAHWA KUALITAS (JALAN TOL) ITU BISA DIJAGA SEHINGGA BISA MEREDUKSI ANGKA KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KUALITAS YANG KURANG BAIK**

kepentingan. Ia mengingatkan agar jangan sampai dikemudian hari, masalah pembebasan lahan menjadi hambatan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Ia berharap adanya keterlibatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan *stakeholder* dalam upaya pemenuhan kebutuhan umum.

Andi Iwan menyadari bahwa proses pembebasan lahan dalam proyek tol selalu menjadi salah satu faktor penghambat dalam perjalanan proyek-proyek pemerintah. “Saya kira dalam proses pembebasan lahan ini, semua *stakeholder* harus terlibat dalam

konteks untuk pemenuhan kebutuhan umum, karena kita tahu bahwa dalam proses pembebasan lahan yang selalu menjadi penghambat di dalam setiap kegiatan pemerintahan,” tegasnya.

Tidak luput dari hematnya, legislator dapil Sulawesi Selatan II itu pun menyinggung akan pentingnya dukungan dari Kementerian Keuangan melalui LMAN. “Kita berharap bahwa apabila lahan yang sudah siap untuk dibebaskan, anggarannya pun sudah ada untuk bisa menyelesaikan semua pembebasan-pembebasan lahan tersebut. Karena terkadang, lahan yang ada sudah bisa dibebaskan tapi uangnya belum ada,” tutupnya. ■ srw/sf

# Komisi V Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Demi Terwujudnya Konektivitas

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan terwujudnya konektivitas antar simpul transportasi, baik bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal. Hal itu disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Yogyakarta.

Syarief mengungkapkan, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini telah dan sedang dilakukan sejumlah pembangunan infrastruktur, baik yang mendukung konektivitas, seperti pembangunan Jalan Tol Jogja – Solo – Kulon Progo, pembangunan Jalur Lintas Selatan,

Bandara Internasional Yogyakarta, maupun pembangunan Jalur Kereta Api Kedundang – Bandara Kulon Progo.

“Kegiatan pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan strategis pariwisata nasional di Yogyakarta dan sekitarnya serta demi mendukung pelayanan transportasi yang prima kepada masyarakat,” ucap Syarif di Kulon Progo, DIY, Sabtu (10/4).

Dikatakannya, ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi V dalam rangka mewujudkan infrastruktur dan transportasi yang berkinerja baik ke depan di Provinsi DIY, diantaranya yaitu dengan lokasi Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo yang terletak di luar Kota Yogyakarta, tentu perlu dukungan fasilitas moda transportasi



## **KEGIATAN PEMBANGUNAN INI DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DI YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA**

yang terintegrasi, baik moda transportasi darat maupun kereta api agar kinerja bandara ini semakin baik.

“Selain itu, PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara ini diharapkan memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima dalam memenuhi harapan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul dan fasilitas bandara yang baik,” tuturnya.

Politisi F-NasDem itu menambahkan, Yogyakarta dan sekitarnya secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI meminta agar semua simpul transportasi dilengkapi dengan alat deteksi gempa dan tsunami demi keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi.

“Pembangunan yang dilakukan oleh mitra kerja Komisi V DPR RI di Yogyakarta ini diharapkan melibatkan masyarakat setempat melalui program berbasis kemasyarakatan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini,” imbuh legislator dapil Kaltim I itu. ■ dep/es



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI ke DIY. Foto: Devi/Man

# Diplomasi Parlemen Menambah Ruang Diplomasi Indonesia



**KITA INGIN MEMBANGUN  
DIPLOMASI TOTAL,  
KARENA HAKEKAT  
POLITIK LUAR NEGERI  
KITA DALAM KERJA SAMA  
DI BERBAGAI BIDANG**

**K**eberadaan diplomasi parlemen menambah ruang diplomasi dalam merespon isu-isu internasional untuk kepentingan nasional. Ini bagian dari diplomasi total Indonesia. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengemukakan, diplomasi parlemen sering kali lebih sukses, karena tidak terikat tata krama diplomasi resmi yang kaku.

“Kita ingin membangun diplomasi total, karena hakekat politik luar negeri kita dalam kerja sama di berbagai bidang adalah untuk kepentingan nasional. Di kamar eksekutif ada Kementerian Luar Negeri yang berdiplomasi dan di kamar legislatif dilakukan oleh BKSAP,” kata Fadli saat memimpin pertemuan dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di DIY, Senin (6/4), dalam rangkaian acara BKSAP Day.

Disampaikan Anggota Komisi I DPR RI tersebut, di era globalisasi ini semua negara tidak bisa mengisolasi diri. Membangun kerja sama antarnegara jadi keniscayaan, baik regional maupun internasional. Dan di parlemen, diplomasi dan kerja sama itu dilakukan BKSAP yang memiliki empat bagian, yaitu

kerja sama regional, internasional, bilateral, dan administrasi luar negeri.

“Secara individu Anggota DPR juga bisa berdiplomasi sesuai kepentingan dapil dan nasional,” ujar politisi Partai Gerindra itu. Ia menilai, diplomasi parlemen sering kali lebih efektif daripada diplomasi pemerintah. Parlemen, lanjut Fadli, bisa memiliki

kebebasan melakukan diplomasi. Isu-isu sensitif pun bisa disampaikan.

Dan beberapa isu nasional dan internasional yang berhasil dilakukan lewat diplomasi parlemen adalah soal Papua merdeka dan produk sawit Indonesia. DPR pernah mengundang negara-negara Pasifik Selatan untuk menjelaskan sekaligus meluruskan isu Papua merdeka. Begitu juga soal sawit, DPR sudah mendesak parlemen Uni Eropa untuk tidak lagi melarang produk sawit Indonesia masuk Eropa.

Sementara untuk isu-isu internasional, masih kata Fadli, DPR intens membicarakan isu kemanusiaan Rohingya dan kemerdekaan Palestina. Kedua isu itu selalu disuarakan DPR di forum regional maupun internasional. ■ mh/sf



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Husen/nvl

# BKSAP DPR Bangun Sinergi Diplomasi Parlemen di Kampus



Foto bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI dengan sivitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS). Foto: Oji/Man

**K**ampus dan mahasiswa merupakan cikal bakal lahirnya demokrasi di Republik Indonesia melalui proses reformasi yang legendaris tahun 1998 silam. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengemukakan dipilihnya kampus sebagai media sosialisasi diplomasi parlemen karena mahasiswa menjadi agen perubahan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami pilih kampus karena melihat dalam demokrasi itu mahasiswa menjadi cikal bakal munculnya demokrasi di Republik Indonesia, tanpa mahasiswa kita tidak mungkin mengalami masa reformasi yang sangat legendaris tersebut,” ungkap Hafisz usai memimpin pertemuan BKSAP DPR RI dengan Rektor, Guru Besar, mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/4).

Menurut Hafisz, pemikiran-pemikiran mahasiswa itu tidak ada intrik-intrik politik, mereka begitu riil. Melalui forum

terhormat yang juga dihadiri para guru besar dan sivitas akademika ini, dengan masuknya BKSAP DPR ke kampus untuk menjelaskan tugas-tugas DPR yang kadang kala juga dikritisi secara positif oleh mahasiswa.

Mengenai fungsi konvensional DPR, Hafisz melanjutkan, yang sudah berjalan puluhan tahun yaitu anggaran, legislasi, dan pengawasan. “Ada satu fungsi yang kadang rakyat tidak tahu, yaitu menciptakan perdamaian dunia dan berperan aktif dalam pergaulan dunia dalam bentuk bebas aktif. DPR berperan serta terhadap diplomasi dunia, makanya kami namanya ‘*second track diplomacy*’, karena di ujung tombaknya tetap pemerintah,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sebagai contoh, di forum internasional BKSAP selalu melihat figur negara yang akan dikunjungi. “Ketika ke Ukraina yang secara hubungan diplomasi sangat bersahabat, hubungan dagang juga lancar, hubungan politik juga baik sekali. Di sini saya melihat ada *gap* (celah) di mana ekspor kita hanya 200 juta dolar AS, sedangkan impornya

700 juta dolar AS. Dalam rapat internal saya mengkritisi itu, bahwa kita harus memperkuat imbal balik dari pada ekspor dan impor,” tandas Hafisz.

“Sebagai negara yang bersahabat maka kita bisa mendorong adanya *balance* (keseimbangan) antara ekspor dan impor. Katakanlah kalau kita banyak impor gandum dari Ukraina, mereka juga harus bersedia mengambil kelapa sawit kita, itu yang saya usulkan kemarin saat rapat dengan Ketua DPR Ukraina. Bagaimana kalau itu di-*counter trade*, ternyata Ukraina belum bisa melakukan itu,” beber legislator dapil Sumatera Selatan I ini.

“Kita pernah lakukan diplomasi *counter trade* saat pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia yang tidak sepenuhnya kita bayar dengan uang. Kita *kasih* bahan makanan kita seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Ini menjadi contoh langkah-langkah perbaikan ekonomi melalui jalur diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP di panggung Internasional,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

■ oji/sf

# Alokasi DAK Harus Sesuai Kebutuhan Daerah

**B**adan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menjangkit masukan dari sivitas akademika Universitas Brawijaya (UB) terkait penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait dengan DAK.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan ialah anggaran DAK meningkat setiap tahunnya, namun serapannya masih rendah. “Kenapa serapan itu rendah, karena yang diusulkan oleh daerah dan diberikan pemerintah pusat itu tidak sinkron. Belum lagi kendala teknisnya lainnya, maka serapan itu jadi rendah,” kata Wahyu di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (6/4).

Sisi lain, Wahyu menegaskan alokasi DAK harus selaras dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan usulan daerah sehingga dana yang bersumber dari APBN itu dapat menunjang pelayanan publik dan berdampak luas bagi masyarakat. Dia menambahkan, DAK dari APBN yang dialokasikan ke daerah, semestinya kegiatan yang didanai merupakan kebutuhan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

“Kita juga harap ada transparansi tentang pemberian DAK ini, juga diberikan *reward* dan *punishment*. Kedua, bahwasanya pemerintah pusat bisa lebih mendengar usulan daerah,

karena sudah pasti kebutuhan daerah di Jawa dengan kabupaten di luar Pulau Jawa kebutuhannya pasti beda,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Wakil Ketua BAKN Anis Byarwati meminta pemerintah pusat dan pemda untuk memperbaiki perencanaan keuangan DAK. Mengingat, seringkali terjadi keterlambatan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat yang mengakibatkan serapan menjadi rendah. “Misalnya program harus dilaksanakan, tetapi juknisnya belum ada. Sehingga tidak bisa direalisasikan dan dana itu menjadi hangus,” ujarnya.

Selain keterlambatan juknis, politisi dari F-PKS ini juga menyoroti sistem perencanaan dan penganggaran DAK melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang belum sinkron dengan prioritas atau kebutuhan daerah. “Jadi, kadang-kadang daerah membuat perencanaan lebih dulu, tapi kemudian setelah itu ketika mereka harus mengisi di aplikasi ternyata kebutuhan itu tidak ada di aplikasi,” jelasnya.

Anis menambahkan, masukan-masukan dan saran dari akademisi sangat penting bagi BAKN untuk menyikapi laporan BPK RI terhadap DAK. Nantinya, dana transfer daerah diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. “Ini menjadi masukan penting bagi BAKN bahwa perlu ada pembenahan-pembenahan DAK, sehingga daerah bisa mendapatkan apa yang benar mereka butuhkan,” tutupnya. ■ *ann/sf*



Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya bertukar cenderamata dengan sivitas akademika UB di Malang. Foto: Anne/NM

# BURT DPR Nilai RS Centra Medika Cibinong Layak Layani Peserta Jamkestama

**P**adatya kegiatan DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional, menuntut kesiapan Anggota Dewan untuk dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan yang sangat padat. Hal ini berimplikasi terhadap Anggota Dewan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) yang prima dan memadai sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah meninjau Rumah Sakit Centra Medika Cibinong, sebagai rumah sakit *provider* PT Asuransi Jasindo dalam program Jamkestama. Kunjungan tersebut guna melihat fasilitas dan layanan sarana/prasarana rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan beserta keluarga.

“Jadi kami hadir hari ini bersama tim guna melihat dan mendengar secara langsung bagaimana pelayanan rumah sakit yang ada di sini, baik dari jumlah kamar yang ada, ataupun dokter-dokter yang beroperasi apakah sudah layak sebagai rumah sakit rujukan bagi Anggota DPR beserta keluarganya,” kata Dimiyati pertemuan dengan jajaran manajemen RS Centra Medika Cibinong, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, layanan RS Centra Medika sudah sangat baik dan layak dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jamkestama, dalam hal ini Anggota Dewan beserta keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Diketahui RS Centra Medika ini memiliki dua layanan kesehatan yang diunggulkan dan menjadi rujukan bagi sejumlah rumah sakit di Bogor, yakni pelayanan kesehatan jantung dan kesehatan otak.

“Saya rasa dengan adanya dua pelayanan yang diunggulkan dan diprioritaskan rumah sakit ini, dinilai sangat baik. Tak hanya itu, pelayanan kesehatan lainpun bisa dibilang mumpuni, baik dari dokter-dokter yang profesional maupun pelayanan kesehatan lainnya,” imbuah Dimiyati. Selain itu, terkait pelayanan pasien Covid-19, RS Centra Medika sudah mempunyai aturan dan protokol kesehatan sesuai aturan Kementerian Kesehatan.

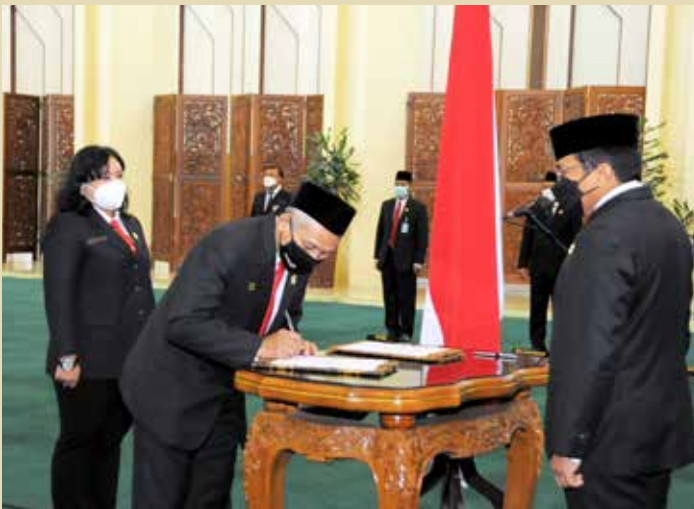
“Dimana akses pasien penderita Covid-19 terpisah dari akses pasien lainnya. Adapun saluran udara maupun AC terpasang dari kamar per kamar tidak melalui AC *central*, jadi dengan demikian sirkulasi udara berjalan dengan baik. Sehingga kalau kita dengarkan seksama penjelasan tersebut, pelayanan penyakit Covid-19 sudah memenuhi standar protokol kesehatan,” tandas legislator dapil Banten I itu sembari berharap RS Centra Medika bisa melayani pasien Jamkestama dan masyarakat secara profesional dan lebih baik lagi. ■ rni/sf



Foto bersama BURT DPR RI dengan jajaran manajemen RS Centra Medika Cibinong, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Foto: Runi/nvl



DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara-negara EFTA (RUU IE CEPA) pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4). Foto: Dok/Man



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin upacara pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4). Foto: Prima/nvl



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI menggelar seminar bertema "Membangun Kemandirian Melalui Wirausaha" di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat, Kamis (8/4). Foto: Azka/nvl